



Hlc. 04.01 / 262 K

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

NOMOR: KEP. 168 /M.PPN/03/2005

TENTANG

**PENUNJUKAN DELEGASI INDONESIA DALAM NEGOSIASI
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP-3)/
THIRD URBAN POVERTY PROJECT (UPP-III)
DENGAN WORLD BANK**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin di Indonesia dan sesuai dengan permintaan dari berbagai Pemerintah Kota/Kabupaten, diperlukan adanya perluasan cakupan wilayah penanganan program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) pada 15 (lima belas) propinsi yang belum terjangkau pada P2KP-1 dan P2KP-2;
 - b. bahwa mengingat besarnya kebutuhan dana untuk pelaksanaan program tersebut dan keterbatasan dana yang dimiliki Pemerintah Indonesia diperlukan dukungan dan pinjaman luar negeri dari World Bank;
 - c. bahwa untuk efektifitas pemanfaatan dan pinjaman sebagaimana dimaksud huruf (b) di atas diperlukan Delegasi Republik Indonesia untuk melakukan negosiasi dengan World Bank dengan susunan keanggotaan yang mencerminkan instansi-instansi terkait;
 - d. bahwa pejabat yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Delegasi Republik Indonesia;

Mengingat: 1. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

2. Keputusan...

2. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu dan Pengangkatan Menteri Negara dalam Kabinet Indonesia Bersatu
5. Keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas No. 185/KMK.03/1995 dan Nomor Keputusan 031/KFT/5/1995, tentang Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN DELEGASI INDONESIA UNTUK MELAKUKAN NEGOSIASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP-3) / *THIRD URBAN POVERTY PROJECT (UPP-3)* DENGAN PIHAK WORLD BANK.**

PERTAMA : Menunjuk Delegasi Republik Indonesia untuk negosiasi P2KP-3 / UPP-3 dengan World Bank pada tanggal 1 April 2005 di Jakarta yang terdiri atas Tim Delegasi dan Tim Teknis.

KEDUA : Dalam melakukan negosiasi, Delegasi Republik Indonesia harus berpedoman kepada beberapa hal sebagai berikut:

1. Setiap pembahasan yang menyangkut aspek teknis, pendanaan, pengelolaan ataupun aspek-aspek lain yang terkait dengan proyek dimaksud harus diupayakan semaksimal mungkin untuk lebih memberikan keuntungan bagi Negara.
2. Rencana desain proyek yang dinegosiasikan sudah memenuhi kriteria-kriteria yang tercantum dalam *Country Portfolio Performance Review (CPPR)* khususnya mengenai Kriteria Kesiapan Proyek.

3. Untuk...

3. Untuk menjamin kelancaran implementasi proyek, pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan proyek terutama dari sisi Pemerintah telah memberikan komitmennya secara formal untuk menyediakan dana pendamping yang diperlukan pada setiap tahun anggaran.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Delegasi terdiri atas:

1. Tatag Wiranto
Deputi Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional,
Kantor Meneg PPN/Bappenas. Sebagai Ketua
2. Direktur Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan,
Ex Departemen Kimpraswil/Direktur Jenderal Cipta
Karya Departemen Pekerjaan Umum. Sebagai
Wakil Ketua
3. Prasetijono Widjojo, MJ
Deputi Pendanaan Pembangunan,
Kantor Meneg PPN/Bappenas. Sebagai Anggota
4. Mulia P. Nasution
Direktur Jenderal Perbendaharaan,
Departemen Keuangan. Sebagai Anggota
5. Achmad Rochjadi
Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan
Keuangan,
Departemen Keuangan. Sebagai Anggota
6. Seman Widjoyo
Direktur Jenderal Bina Bangda,
Departemen Dalam Negeri. Sebagai Anggota
7. Joharis Lubis
Deputi IV Kantor Menko Kesra, Sebagai Anggota
8. Penny Lukito-Firdaus
Direktur Perkotaan dan Perdesaan,
Deputi Bidang Otda & Pengembangan Regional,
Kantor Meneg PPN/Bappenas. Sebagai Anggota
9. Delthy S. Simatupang
Direktur Kerjasama Luar Negeri Multilateral,
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,
Kantor Meneg PPN/Bappenas. Sebagai Anggota

10. Agus...

10. Agus Jarot Hadikustanto
Direktur Bina Teknik,
Ditjen Perumahan dan Permukiman,
Eks Departemen Kimpraswil. Sebagai Anggota
11. Bambang Goeritno
Direktur Bina Teknik, Ditjen TPTP,
Eks Departemen Kimpraswil. Sebagai Anggota
12. Dharma Bakti
Direktur Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri,
Ditjen Perbendaharaan,
Departemen Keuangan. Sebagai Anggota
13. Adriansyah
Direktur Pembiayaan & Informasi Keuangan Daerah,
Ditjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan,
Departemen Keuangan. Sebagai Anggota
14. Maurin Sitorus
Kepala Biro Hukum, Departemen Keuangan. Sebagai Anggota
15. Haryo Sasongko
Direktur Perkotaan, Ditjen Bina Bangda
Departemen Dalam Negeri. Sebagai Anggota
16. Tjindra Parma W
Kepala Biro Hukum, Eks Departemen Kimpraswil. Sebagai Anggota

KEEMPAT : Susunan keanggotaan Tim Teknis yang bertugas membantu Tim Delegasi terdiri atas:

1. Penny Lukito-Firdaus
Direktur Perkotaan dan Perdesaan,
Deputi Bidang Otda & Pengembangan Regional,
Kantor Meneg PPN/Bappenas. Sebagai Ketua
2. Agus Jarot Hadikustanto
Direktur Bina Teknik,
Ditjen Perumahan dan Permukiman,
Eks Departemen Kimpraswil. Sebagai Wakil Ketua
3. Imam S. Ernawi
Kepala Pusat Kajian Kebijakan
Eks Departemen Kimpraswil. Sebagai Anggota

4. Fuadi...

4. Fuadi
Asdep Bidang Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Urusan Pemberdayaan Manusia &
Lingkungan SD UKMK, Kantor Menko Kesra. Sebagai Anggota
5. Haryo Raharjo
Kasubdit Kawasan Perdesaan dan Agropolitan,
Direktorat Perkotaan dan Perdesaan,
Deputi Bidang Otda & Pengembangan Regional,
Kantor Meneg PPN/Bappenas. Sebagai Anggota
6. Rinella Tambunan
Kasubdit Kawasan Perkotaan,
Direktorat Perkotaan dan Perdesaan,
Deputi Bidang Otda & Pengembangan Regional,
Kantor Meneg PPN/Bappenas. Sebagai Anggota
7. Obrian Saragih
Kasubdit Multilateral II,
Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral,
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,
Kantor Meneg PPN/Bappenas. Sebagai Anggota
7. Baharuddin
Kasubdit Pinjaman Daerah,
Direktorat Pembiayaan & Informasi Keuangan
Daerah,
Ditjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan,
Departemen Keuangan. Sebagai Anggota
8. Hermany Noor
Kasubdit PHLN I, Direktorat PPHLN,
Ditjen Perbendaharaan,
Departemen Keuangan. Sebagai Anggota
9. Ismail Bama
Kasubdit Kawasan Kumuh,
Ditjen Bina Bangda, Departemen Dalam Negeri. Sebagai Anggota
10. Danny Sutjiono
Kasubdit Perencanaan & Penganggaran,
Ditjen Perumahan dan Permukiman,
Ex. Departemen Kimpraswil. Sebagai Anggota
11. Agus Sumargiarto
Kabag Hukum,
Seditjen Perumahan dan Permukiman,
Ex. Departemen Kimpraswil. Sebagai Anggota

12. Arianto...

12. Arianto
Fimpro P2KP, Ex. Departemen Kimpraswil. Sebagai Anggota
13. Rudi S. Prawiradinata
Kasi Kebijakan Kawasan Perkotaan,
Direktorat Perkotaan dan Perdesaan,
Deputi Bidang Otda & Pengembangan Regional,
Kantor Meneg PPN/Bappenas. Sebagai Anggota
14. Teni Widuriyanti
Kasi Asian Development Bank Direktorat Pendanaan
Luar Negeri Multilateral,
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,
Kantor Meneg PPN/Bappenas. Sebagai Anggota
15. Agustin Arry Yanna
Kasi World Bank Direktorat Pendanaan Luar Negeri
Multilateral,
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,
Kantor Meneg PPN/Bappenas. Sebagai Anggota
16. Niken Pudyastuti
Kasi PHLN IB, Direktorat PPHLN,
Ditjen Perbendaharaan,
Departemen Keuangan. Sebagai Anggota
17. Dewi Chomistriana
Kasi PJMP, Direktorat Bina Teknik,
Ditjen Perumahan dan Permukiman,
Ex. Departemen Kimpraswil. Sebagai Anggota
18. Suprayitno
Kasi Perencanaan dan Perancangan Kawasan
Kumuh Perkotaan, Ditjen Bina Bangda,
Departemen Dalam Negeri. Sebagai Anggota
19. Aswin Grandiarto
Staff Direktorat Bina Teknik,
Ditjen Perumahan dan Permukiman,
Ex. Departemen Kimpraswil. Sebagai Anggota
20. Bobby Ali Azhari
Staff Direktorat Bina Teknik,
Ditjen Perumahan dan Permukiman,
Ex. Departemen Kimpraswil. Sebagai Anggota
21. Effendi Siahaan
Staff Direktorat PPHLN,
Ditjen Perbendaharaan,
Departemen Keuangan. Sebagai Anggota

- KELIMA : Delegasi Republik Indonesia wajib bertanggung jawab dan melaporkan hasil negosiasi P2KP-3 / UPP-3 tersebut kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI
- KEENAM : Segala biaya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan negosiasi P2KP-3 / UPP-3 tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Ditjen Perumahan dan Perumahan, Eks Departemen Kimpraswil.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, hingga terselesaikannya negosiasi dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal 24 Maret 2005

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
MS



SRI MULYANI INDRAWATI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat
2. Sdr. Menteri Keuangan
3. Sdr. Menteri Dalam Negeri
4. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum
5. Sdr. Menteri Negara Perumahan Rakyat
6. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1515 /MK/200...5
TGL. 21/3

MEMORANDUM

Nomor: 220/Ses/03/2005

Kepada Yth. : Ibu Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas
Dari : Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas
Perihal : Konsep SK DELRI untuk Negosiasi Proyek World Bank UPP3
Tanggal : 16 Maret 2005

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan konsep SK Meneg. PPN/Kepala Bappenas tentang DELRI untuk Negosiasi Proyek World Bank Third Urban Poverty Project (UPP-3) sebagaimana yang diusulkan oleh Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan. Rencana negosiasi adalah pada tanggal 22 dan 23 Maret 2005.

Apabila Ibu berkenan mohon tandatangan SK terlampir.

